

PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENANGANI KEMISKINAN DI KELUARAHAN KLAMPIS NGASEM

*** Anak Agung Istri Suwandewi¹, Dida Rahmadanik²**

1) Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Indonesia

2) Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Indonesia

Abstrak

Memberantas kemiskinan tentu menjadi catatan penting bagi sebuah negara. Dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs), artinya pembangunan berkelanjutan untuk melindungi bumi. Terdapat 17 tujuan global dari SDGs, tujuan utamanya adalah kemiskinan. Salah satu cara untuk pemberantasan kemiskinan yakni melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program unggulan SDGs. Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya, PKH ditujukan pada masyarakat miskin. PKH di Kelurahan Klampis Ngasem terus melakukan evaluasi. Untuk melihat hal itu, diperlukan teori guna menganalisisnya. Pada penelitian ini, menggunakan teori evaluasi implementasi dari Randal B Ripley dan Grace A Franklin, terdapat dua fokus utama dalam evaluasi implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, PKH dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, walaupun tidak seratus persen. Dengan demikian, PKH di Kelurahan klampis Ngasem terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan; *Sustainable Development Goals*.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indeks krusial kemajuan pembangunan suatu negara yang juga akan berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang terbaik agar mengurangi jumlah kemiskinan. Menurut Professor Jeffrey Sach, kemiskinan yaitu seseorang atau rumah tangga yang tidak dapat memiliki kehidupan yang layak, hidup di bawah perangkap kemiskinan mengartikan hidup tanpa pegangan dasar seperti bisnis, infrastruktur, alam, public, stitusional, manusia, dan kognitif. Dalam buku miliknya, Professor Jeffrey Sach yang berjudul *The end of poverty: economic possibilities for our time*, menyebutkan bahwa berhasil pembangunan ekonomi global di sebagian besar dunia mengingatkan kita pada miliaran orang yang

belum merasakan keberhasilan tersebut. Seperenam umat manusia terus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Kemiskinan ekstrem yang mereka alami begitu parah hingga merenggut nyawa mereka. Setiap tahun, jutaan orang terus meninggal karena kemiskinan ekstrem yang menghalangi mereka mengakses alat-alat dasar untuk bertahan hidup.

Begitu lingkaran setan kemiskinan di berbagai dunia yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Syarat untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi adalah turunnya angka kemiskinan. Di Indonesia, belum ada tanda-tanda berakhirnya kemiskinan yang menjadi permasalahan sejak lama. Menurut Badan Pusat Statistik Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, turun 0,21% dibandingkan September 2022 dan menurun 0,18% terhadap Maret 2022. Sedangkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta jiwa, turun 0,46 juta jiwa dibandingkan September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, meningkat sebesar 10,49%. Angka kemiskinan perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,71%, pada September 2022 meningkat menjadi 7,78%. Sedangkan angka kemiskinan perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,69%, pada September 2022 meningkat menjadi 13,90%. Jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2022 bertambah 24,18 ribu orang (dari 1,721 juta orang pada Maret 2022 menjadi 1,752 juta orang pada September 2022). Keluarga Miskin Klampis Ngasem mencatat data tahun 2023, bulan Januari sampai April, laju pertumbuhan keluarga miskin bulan Januari sampai Oktober 2023 terlihat grafik dari atas ke bawah. Dari bulan Januari sampai April tidak terjadi kenaikan dan penurunan, artinya terjadi stagnasi. Pada bulan Mei hingga Agustus angka kemiskinan mengalami penurunan, sedangkan pada bulan September kembali meningkat, dan data terakhir pada bulan Oktober menunjukkan adanya penurunan kemiskinan.

Proses penurunan angka kemiskinan tidaklah mudah, diperlukan waktu yang tidak singkat dan perlu ditata sedemikian rupa agar proses dari tujuan tersebut berjalan sesuai dengan baik. Maka dari itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang terdiri dari 193 negara, pada sidang umum PBB bulan September 2015, menyepakati Sustainable

Development Goals (SDGs) yaitu agenda 2030. SDGs kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. SDGs yaitu merupakan kerangka kerja dunia sebagai agenda 2030 untuk tujuan berkelanjutan. SDGs bertujuan mengatasi tantangan global, seperti kelaparan, perubahan iklim, dan banyak lainnya. Terdapat 17 tujuan, yang menjadi tujuan utama adalah kemiskinan. Dengan mengatasi kemiskinan, tentu dapat membantu mencapai tujuan SDGs guna menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan menyeluruh.

Melalui Dinas Sosial Kota Surabaya, membantu rencana dan target yang ditetapkan oleh PBB melalui SDGs, yaitu dengan menciptakan kondisi Kota Surabaya hingga pada tingkat Kelurahan untuk menekan kemiskinan. Untuk hak tersebut, SDGs mempunyai program unggulan yang diimplementasikan oleh Kota Surabaya, yaitu Program Keluarga Harapan yaitu upaya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. PKH banyak bentuknya dalam memberikan bantuan. Sebagai program bantuan sosial pada masyarakat, pemerintah memberi akses melalui PKH terutama untuk ibu yang sedang mengandung dan anak, guna memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan layanan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas. Melalui setiap instansi kependudukan dari pusat sampai bawahannya, meliputi kecamatan maupun kelurahan.

Kota Surabaya mencakup Kecamatan Sukolilo, memiliki tujuh kelurahan, salah satunya yaitu Kelurahan Klampis Ngasem. Berada di Surabaya, kelurahan Klampis Ngasem memiliki sembilan RW dan empat puluh delapan RT. Sejak tahun 2013, Kelurahan Klampis Ngasem telah mengimplementasikan PKH sesuai dengan landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Tidak semua warga menerima bantuan dari program ini, hanya warga yang didata dari pusat dan dijalankan oleh kelurahan. Kriteria penerima PKH menurut PerMenSos Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, terdapat beberapa komponen penerima PKH, seperti ibu hamil/menyusui, anak baru lahir sampai berusia 6 tahun, anak yang berada di bangku sekolah, lanjut usia, juga penyandang disabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan penurunan, sehingga Kementerian Sosial pada tahun 2007 Program Keluarga Harapan diimplementasikan. Kemensos telah menyalurkan bantuan langsung tunai pada program keluarga harapan. Menurut Kementerian Sosial, setiap keluarga yang kurang mampu, mendapatkan bantuan dengan nominal Rp900.000 hingga Rp3.000.000/tahun (Setiawan, 2022). Terdapat beberapa komponen yang mendapatkan bantuan dari PKH, namun terdapat Batasan dalam penyaluran bantuan ini. Perhitungannya, bantuan PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga dan hal ini sudah tercantum dalam Surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indek Bantuan Sosial. Tujuan dari PKH guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, dan tentu saja untuk mengurangi kemiskinan.

Pembangunan berkelanjutan berdampak dengan seiringnya globalisasi yang menyebabkan perubahan pada isi dunia. Pelaksanaan Sustainable Development Goals bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta menjaga kualitas kehidupan selanjutnya. Sebelum berjalannya SDGs, Millennium Development Goals (MDGs) terlebih dahulu memiliki tujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, karena tujuan MDGs perlu disempurnakan lagi, maka dari itu, SDGs di jalankan. SDGs yang mempunyai 17 tujuan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan pada tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota. Saat MDGs berlangsung, Indonesia telah mencapai 49 target dari 67 tujuan MDGs, dan masih perlu dilanjutkan pada SDGs. Mengutip dari Bappenas, konsep SDGs perlu menjadi acuan adaptasi dengan semua perkembangan dunia. Perubahan yang terjadi seperti kerusakan lingkungan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, juga perubahan iklim yang semakin terasa saat ini.

Randal B Ripley dan Grace A Franklin, dalam evaluasi implementasi, terdapat dua fokus utama. Pertama, Kepatuhan (*Compliance*), guna mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Kepatuhan itu mengarah pada perilaku pelaksana kebijakan, apakah implementasi berhasil jika pelaksana kebijakan mematuhi aturan kebijakan. Berdasarkan kondisi seperti itu, terdapat dua indikator dalam pendekatan kepatuhan, yaitu perilaku dan pemahaman implementor terhadap suatu kebijakan. Fokus

kedua, terdapat indicator yang menjabarkan apa yang terjadi dan mengapa (*What's happening and why?*) melihat seperti apa implementasi terjadi dengan melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi program. Ada lima indikator untuk menjelaskan pendekatan ini, yaitu jumlah aktor yang terlibat, kejelasan hajuan, kompleksitas program pemerintah, dan partisipasi unit penerintahan di semua tingkatan daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi (Ripley & Franklin, 1988:1).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, data skunder berasal dari artikel jurnal maupun dari referensi lainnya. Kemudian, lokasi penelitian yaitu itu Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya. Persiapan yang dilakukan yaitu dengan bertanya kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Klampis Ngasem dan pendamping PKH kecamatan Sukolilo. Setelah melakukan persiapan, dilihat upaya apa saja yang digunakan untuk melancarkan PKH. Sasaran pada penelitian ini adalah masyarakat kurang mampu Kelurahan Klampis Ngasem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sukolilo, Surabaya memiliki tujuh kelurahan, termasuk Kelurahan Klampis Ngasem. Kelurahan ini terletak di Jalan Arief Racman Hakim, Surabaya Jawa Timur, mencakup 9 RW dan 48 RT. Banyaknya masyarakat di Kelurahan Klampis Ngasem, tidak dipungkiri terdapat masyarakat yang kurang mampu. Data dari Sie Kepala seksi kesejahteraan Klampis Ngasem menunjukkan bahwa jumlah keluarga mmiskin komulatif per oktober 2023 sejumlah 615 KK, 1.834 jiwa, tidak terus menurun jumlah angka kemiskinan, grafik pertumbuhan keluarga miskin di Klampis Ngasem per bulan oktober 2023 juga beberapa kali mengalami kenaikan.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Keluarga Miskin Klampis Ngasem



Gambar 2. Jumlah Keluarga Miskin Kelurahan Klampis Ngasem

Diakibatkan hal tersebut, Kelurahan Klampis Ngasem sangat mengayomi warganya, berusaha menjadikan kelurahan yang berkelanjutan dengan mengurangi angka kemiskinan dengan program yang dikerahkan oleh pemerintahan pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, pada Pasal 4 (1) Sasaran PKH Akses adalah keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa kriteria yang mendapatkan bantuan dari PKH yaitu orang kurang mampu.

Pada Program Keluarga Harapan, terdapat beberapa kriteria komponen yang mendapatkan bantuan tersebut. Pertama, komponen kesehatan, meliputi ibu hamil atau menyusui juga anak baru lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun. Kriteria komponen kedua, anak yang masih duduk di bangku sekolah sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Kriteria komponen ketiga, yaitu kesejahteraan sosial, mencakup lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas, namun diutamakan penyandang disabilitas berat.

Nominal PKH 2023	
Bagi yang belum tahu, inilah jumlah nominal PKH 2023 sesuai kategorinya:	
1. Ibu hamil	akan mendapatkan Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3 juta per tahunnya.
2. Anak usia dini/balita	Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3 juta per tahunnya.
3. Lansia	akan mendapatkan Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2,4 juta per tahunnya.
4. Disabilitas	Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2,4 juta per tahunnya.
5. Anak sekolah SD	Rp225.000 untuk setiap tahap atau Rp900 juta per tahunnya.
6. Anak sekolah SMP	Rp375.000 untuk setiap tahap atau Rp1,5 juta per tahunnya.
7. Anak sekolah SMA	Rp500.000 untuk setiap tahap atau Rp2 juta per tahunnya.

Gambar 3. Nominal Bantuan PKH

Kendatipun telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya, PKH masih perlu dievaluasi dalam implementasinya. Melalui penelitian ini, PKH evaluasi implementasi menggunakan teori Randal B Ripley dan Grace A Franklin. Maka, analisis penelitian ini tersdapat dua fokus, sebagai berikut:

1. Kepatuhan

Melihat kepatuhan implementator terhadap prosedur yang dijalankan. Dalam penelitian ini, implementator yaitu Kelurahan Klampis Ngasem, lebih tepatnya petugas lapangan yang mengurus kesejahteraan masyarakat (Kepala

Seksi Kesejahteraan). Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2 (dua) indikator dari kepatuhan yang terdiri dari perilaku implementator dan kepatuhan implementator sudah terpenuhi. Implementator patuh terhadap kebijakan dan paham akan kebijakan, terbukti implementator terus melakukan evaluasi guna menyempurnakan jalannya PKH. Pada awal implementasi PKH di Kelurahan Klampis Ngasem, banyak yang mendapatkan bantuan PKH, artinya bantuan tidak tepat sasaran. Kemudian, dilakukan evaluasi kebijakan menjadi mencoret masyarakat yang sudah mampu. Jika pada saat melakukan hal tersebut, masyarakat proses, pekerja lapangan harus melakukan pendekatan hingga nama masyarakat yang mendapatkan bantuan sebelumnya sudah dianggap mampu tersebut bisa dihapus.

2. Apa yang Terjadi dan Mengapa (*What's happening and why?*)

Digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu program menggunakan 5 (lima) indikator.

2.1 Banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi PKH, entitas peserta adalah Menteri Sosial Republik Indonesia, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan masyarakat.

2.2 Kejelasan hajuan, dalam PKH, kejelasan hajuan merujuk pada bantuan yang diberikan pada masyarakat yang menerima disetiap komponennya.

Dari penuturan pendamping PKH Kecamatan Sukolilo, yaitu,

- Ibu hamil akan mendapatkan Rp750.000/termin atau Rp3.000.000/tahun
- Anak usia dini/balita mendapatkan Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun
- Lansia memperoleh Rp600.000/tahap atau Rp2,400.000/tahun
- Disabilitas menerima Rp600.000/tahap atau Rp 2,400.000/tahunnya

- Anak Sekolah Dasar mendapatkan sebesar Rp250.000/tahap atau Rp900.000/tahunnya
- Anak Sekolah menengah pertama sebesar Rp375.000/tahap atau Rp1,500.000/tahun
- Anak Sekolah Menengah Atas mendapatkan sebesar Rp500.000/termin dan Rp 2.000.000/tahunnya.

2.3 Kompleksitas program pemerintah, dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kompleksitas program, seperti tujuan dan sasaran yang mana tentu adalah masyarakat atau keluarga miskin dan rentan yang terdaftar pada data terpadu program penanganan masyarakat miskin, memiliki akses kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial Klampis Ngasem sesuai tujuan pasal 2 yaitu penerima manfaat taraf hidupnya meningkat melalui penjangkauan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dan menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan juga mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

2.4 Partisipasi pemerintahan di semua tingkat daerah, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi, yaitu Pemerintahan Kota Surabaya ikut andil dalam PKH, kemudian, dikerahkan ke tingkat bawah, sampai di kelurahan. Maka dari itu, Kelurahan Klampis Ngasem berpartisipasi dalam program ini, tentu dengan menjalankan Program Keluarga Harapan dengan sebagaimana mestinya, yang ditangani oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Klampis Ngasem.

2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, di dalam penelitian ini, PKH dapat terimplementasi karena ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan kapasitas SDM. Anggaran yang digunakan dalam Program Keluarga Harapan yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melibatkan masyarakat dapat mendapatkan dukungan

PKH, dan keberhasilan implementasi PKH sangat bersangkutan dengan sumber daya manusia, termasuk petugas lapangan PKH.

Bersadarkan analisis menggunakan teori evaluasi implementasi dan penuturan dari pendamping PKH Kecamatan Sukolilo, Program Keluarga Harapan tersebut dapat dilihat bahwa adanya program sosial yaitu PKH sangat membantu masyarakat terutama masyarakat Klampis Ngasem. Keluarga yang awalnya kurang mampu dalam membiayai sekolah, pengobatan, dan lainnya, sehingga meminjam uang, namun, dengan adanya bantuan sosial PKH, masyarakat yang kurang mampu tersebut menjadi tidak meminjam uang untuk kebutuhannya. Tetapi, dibalik itu semua, masih terdapat bantuan tidak tepat sasaran. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya membuat peraturan baru, yakni kebijakan Keluarga Miskin Kota Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya penelitian yang berfokus pada evaluasi implementasi dari Program Keluarga Harapan Kelurahan Klampis Ngasem, nyatanya memberikan dampak yang cukup baik pada masyarakat Klampis Ngasem. Keluarga yang kurang mampu, kini merasakan keringanan akibat dari bantuan sosial PKH. Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan dari pendamping PKH Kecamatan Sukolilo dan diperlihatkan pada gambar yang menunjukkan grafik keluarga miskin Klampis Ngasem. Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tersebut terimplementasi cukup baik di Kelurahan Klampis Ngasem.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu implementasi Program Keluarga Harapan perlu diawasi dengan ketat, karena masih ada yang mendapatkan bantuan namun sudah dikategorikan keluarga cukup mampu dan keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan dari PKH. Kelurahan Klampis Ngasem harus berupaya agar hal seperti itu tidak terjadi berkelanjutan..

REFERENSI

- Aziz, Iwan J. (2010). *Pembangunan Berkelanjutan: peran dan kontribusi*. Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Erwandari, N. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg's) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau. *Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 875–888.
- Nurul Najidah dan Hesti Lestari. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Permensos No 1 Tahun. (2018). Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Rachmiatie, A., Setiawan, F., Yuningsih, A., & Suja'i, I. S. (2023). Halal Tourism Village Potential Through Asset Based Community Development. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 133-143.
- R M Mthethwa. (2012). Critical dimensions for policy implementation. *African Journal of Public Affairs*, 5(2), 36–47.
- Sachs, J. (2008). The end of poverty: economic possibilities for our time. *European Journal of Dental Education*, 12(s1), 17–21. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0579.2007.00476.x>.
- Setiawan, F. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol*, 6(01).